



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001 - 3524011

Surabaya, 12 Agustus 2025

Nomor : 900.1/ 10010 /203.6/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Penilaian Kesesuaian
Rancangan KUA dan Rancangan
PPAS dengan KEM PPKF

Yth. Bupati Pacitan
di
T E M P A T

Menindaklanjuti dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan KEM PPKF.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan hasil penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten Pacitan dengan KEM PPKF. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyelarasan ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Namun dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penelitian tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Evaluasi penilaian dilaksanakan setelah diterima secara lengkap dan andal pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian RKUA PPAS dengan KEM PPKF. Adapun kelengkapan persyaratan pelaksanaan evaluasi penilaian telah terpenuhi pada tanggal 07 Agustus 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A.n Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker 991820

Nama Pemda : Kabupaten Pacitan

Verifikator : Provinsi Jawa Timur

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	4,29 - 4,98	5,8% - 6,3%	Apresiasi karena Pemerintah Kabupaten telah menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 6,3% . Target pertumbuhan tersebut telah melebihi target indikator Makro Pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 4,29 - 4,98 . Selain itu dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Juli 2025 perihal Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 diharapkan dapat disesuaikan pada Perubahan RKPD 2026 dan menjadi acuan dalam perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026. Agar pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dapat mempertahankan target pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat baseline data dan proyeksi sektoral (pertanian, pariwisata, dan UMKM) serta melakukan penguatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi PAD dan penajaman belanja modal agar target pertumbuhan lebih realistis dan terukur dampaknya terhadap ekonomi local juga untuk memastikan target ini diselaraskan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS 2026, sesuai Surat Edaran Sekdaprov Jatim tanggal 29 Juli 2025.

Tingkat Kemiskinan	10,48 - 12,00	12,9% - 11,25%	Pemerintah Kabupaten telah menetapkan target Tingkat Kemiskinan sebesar 12,9% - 11,25%. Target Tingkat Kemiskinan tersebut tidak selaras dengan target indikator Makro Tingkat Kemiskinan yang ditetapkan sebesar 10,48 - 12,00. Selain itu dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 Juli 2025 perihal Pemutakhiran Penyelarasan Indikator Sasaran Pembangunan dan IUP pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 diharapkan dapat disesuaikan pada Perubahan RKPD dan menjadi acuan dalam perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Pacitan agar mempercepat program pemberdayaan ekonomi desa, koperasi, dan UMKM yang bersifat padat karya. Dapat pula dengan memperluas cakupan jaminan sosial daerah dan bantuan sosial terarah serta mengoptimalkan sinergi belanja antar perangkat daerah, termasuk penggunaan Dana Desa dan Dana Transfer Khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan dasar. Sebaiknya kedepan Pemerintah Kabupaten Pacitan merevisi target tingkat kemiskinan agar lebih terarah dan mencerminkan sinkronisasi dengan RPJMD dan target nasional.
--------------------	---------------	----------------	--

B. Penyelarasan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Selaras	Untuk lebih mengakselerasi investasi, Pemkab Pacitan dapat merinci lebih lanjut program dan kegiatan di bidang penanaman modal yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi perizinan, promosi investasi unggulan daerah, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta menentukan indikator kinerja yang spesifik terkait peningkatan nilai investasi dan jumlah lapangan kerja yang tercipta dari aktivitas investasi. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD mendukung pertumbuhan ekonomi (pengembangan SDM, penguatan modal, dan administrasi pemerintah daerah yang pro investasi)
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	Selaras	Untuk meningkatkan Indeks Kesehatan secara lebih terarah, Pemkab Pacitan dapat mengidentifikasi indikator kunci yang membentuk Indeks Kesehatan (misalnya angka harapan hidup, angka kematian bayi/ibu, prevalensi stunting, akses layanan kesehatan) dan menetapkan target spesifik untuk masing-masing indikator tersebut dan memastikan program kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar (UKP dan UKM) tetapi juga pada upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan dan fasilitas yang merata di seluruh wilayah. Pengelolaan belanja kesehatan yang berkualitas dalam APBD Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dan creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Kesehatan tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	Selaras	Untuk memperkuat ketahanan pangan dari sektor perikanan, Pemkab Pacitan dapat meningkatkan program peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, diversifikasi produk perikanan, serta pengembangan pasar untuk hasil perikanan dan juga menetapkan target peningkatan produksi perikanan dan peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya sebagai indikator kinerja. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Ketahanan Pangan (Perikanan) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung penguatan belanja untuk kerja sama antar daerah, perluasan akses pasar dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Uraian	Status	Keterangan
Ketahanan Pangan (Pertanian)	Selaras	Untuk ketahanan pangan pada sektor pertanian, Pemkab Pacitan dapat merinci program yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna, diversifikasi tanaman pangan, serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta menetapkan target peningkatan produksi komoditas pangan strategis dan penurunan tingkat kerawanan pangan sebagai indikator kinerja. Pengelolaan belanja ketahanan pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Ketahanan Pangan (Pertanian) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung ketahanan pangan (perbaikan struktur upah, penurunan angka pengangguran, peningkatan Nilai Tukar Petani, pengendalian inflasi, pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran)
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Selaras	Untuk dampak maksimal pada penurunan kemiskinan, Pemkab Pacitan dapat memastikan program pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa, pelatihan kewirausahaan, dan akses permodalan kemudian memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan manajemen, fasilitasi akses pasar, dan kemudahan dalam permodalan serta menyertakan indikator kinerja yang secara langsung mengukur dampak program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan jumlah UMKM yang naik kelas. Pengelolaan belanja ketahanan pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. agar menjadi perhatian belanja fungsi perlindungan sosial terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan mandatory spending yang mendukung Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan. Mohon dipastikan pengawal kebijakan pada indikator Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Uraian	Status	Keterangan
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Selaras	Meskipun alokasi untuk pendidikan sangat besar, fokus pada "SPM Pendidikan Tinggi" secara spesifik belum terlihat jelas dalam program yang diuraikan. Pemkab Pacitan dapat mengidentifikasi secara spesifik bagaimana alokasi pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, baik melalui dukungan langsung kepada institusi pendidikan tinggi di Pacitan (jika ada), beasiswa bagi mahasiswa Pacitan, atau program peningkatan kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri local kemudian merinci bagaimana SPM Pendidikan Tinggi akan dicapai dan diukur, mengingat SPM umumnya lebih terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika yang dimaksud adalah dukungan terhadap akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Pacitan, maka program perlu dirinci lebih lanjut. Agar menjadi perhatian dalam pemenuhan belanja fungsi pendidikan, pengelolaan belanja pendidikan yang berkualitas. Pemda diharapkan mencantumkan target prevalensi stunting dalam dokumen KUAPPAS. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator pendidikan tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasaan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	- Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; - Meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan seperti fasilitas perluasan market dan kapasitas industri; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi; - Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan; - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. - Optimaliasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.	none	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Indikator yang pertama yakni Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah menentukan kemajuan daerah tersebut. Di Kabupaten Pacitan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi mulai tahun 2021–2024 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2021 capaian pertumbuhan ekonomi hanya di angka 2,49% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 5,54% dan turun pada tahun 2023 di angka 4,46%. Pelambatan masih terjadi di tahun 2024 dimana persentase pertumbuhan ekonomi berada pada 4,34%. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum stabil ini dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya meliputi: - Ketimpangan Pembangunan: Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara daerah yang maju dan terbelakang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada daerah-daerah terpinggirkan. - Grand Design Ekonomi Kabupaten Pacitan: Tematik Pariwisata dapat menjadi pengungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dalam pembangunan Sektor Pariwisata sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan kolaborasi antar berbagai Perangkat Daerah, sektor swasta dan masyarakat. Penyusunan Grand Design Tematik Pariwisata di Kabupaten Pacitan menjadi sebuah Road Map untuk mengetahui siapa berbuat apa dalam rangka mencapai tujuan tersebut.	Selaras	Untuk lebih mengakselerasi investasi, Pemkab Pacitan dapat merinci lebih lanjut program dan kegiatan di bidang penanaman modal yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi perizinan, promosi investasi unggulan daerah, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta menentukan indikator kinerja yang spesifik terkait peningkatan nilai investasi dan jumlah lapangan kerja yang tercipta dari aktivitas investasi. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD mendukung pertumbuhan ekonomi (pengembangan SDM, penguatan modal, dan administrasi pemerintah daerah yang pro investasi)

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			- Infrastruktur yang Terbatas: Ketersediaan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan raya, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kekurangan infrastruktur tersebut dapat mengurangi daya saing daerah dan membatasi akses terhadap pasar dan sumber daya. - Akses Terhadap Modal: Keterbatasan akses terhadap modal, baik dalam bentuk investasi maupun kredit, dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor bisnis lokal. Kurangnya akses terhadap modal dapat menghambat inovasi, ekspansi usaha, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. - Keterampilan Tenaga Kerja: Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di beberapa daerah, terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan keterampilan yang dimiliki oleh penduduk lokal. - Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat menghadapi tantangan serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ancaman seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak infrastruktur, mengganggu produksi pertanian, dan menghancurkan sumber daya alam.		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
			- Kebijakan Pemerintah Daerah: Kebijakan pemerintah daerah yang tidak kondusif, birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, atau kurangnya transparansi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Perlunya reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. - Kemitraan dan Kolaborasi: Kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademis dapat menjadi kunci untuk mengatasi berbagai isu pertumbuhan ekonomi daerah. Kemitraan yang kuat dan kolaboratif dapat memperkuat kapasitas lokal, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang baru untuk pembangunan ekonomi		

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	- Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.	none	- Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah. - Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan. - Makan Bergizi Gratis: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial - Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak, lansia, dan keluarga kurang mampu. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan daerah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif, sehingga dapat mengurangi masalah gizi buruk yang masih banyak dijumpai di daerah-daerah tertentu. - Sebagai tambahan, untuk memperkuat keberlanjutan program ini, pemerintah daerah bisa melibatkan Koperasi Merah Putih dalam penyediaan pangan lokal yang bergizi. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong perekonomian lokal melalui pembelian bahan makanan dari petani dan pelaku usaha mikro setempat.	Selaras	Untuk meningkatkan Indeks Kesehatan secara lebih terarah, Pemkab Pacitan dapat mengidentifikasi indikator kunci yang membentuk Indeks Kesehatan (misalnya angka harapan hidup, angka kematian bayi/ibu, prevalensi stunting, akses layanan kesehatan) dan menetapkan target spesifik untuk masing-masing indikator tersebut dan memastikan program kesehatan tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar (UKP dan UKM) tetapi juga pada upaya promotif dan preventif, serta peningkatan kualitas SDM kesehatan dan fasilitas yang merata di seluruh wilayah. Pengelolaan belanja kesehatan yang berkualitas dalam APBD Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dan creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Kesehatan tersebut dalam rancangan

			• Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan prioritasRPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati dengan mempertimbangkan ketercukupan belanja bidang kesehatan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah;		PPAS/RKA SKPD/RAPBD.
--	--	--	---	--	----------------------

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Perikanan)	- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; - Penguatan kerja sama antar daerah; - Mengembangkan industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; - Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas perikanan; - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	none	DBH-SDA Perikanan Pendapatan DBH-SDA Perikanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Perikanan Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan alokasi Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara Tahun Anggaran 2026. (a) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2026 termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan alokasi Perikanan ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.	Selaras	Untuk memperkuat ketahanan pangan dari sektor perikanan, Pemkab Pacitan dapat meningkatkan program peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan, diversifikasi produk perikanan, serta pengembangan pasar untuk hasil perikanan dan juga menetapkan target peningkatan produksi perikanan dan peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya sebagai indikator kinerja. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Ketahanan Pangan (Perikanan) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung penguatan belanja untuk kerja sama antar daerah, perluasan akses pasar dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	• Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting; • Optimalisasi belanja daerah untuk mempertahankan tingkat produktivitas pertanian.	none	- Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam dapat menghadapi tantangan serius dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ancaman seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak infrastruktur, mengganggu produksi pertanian, dan menghancurkan sumber daya alam. Tantangan pertumbuhan ekonomi pada sub sektor pertanian ke depan semakin besar. Meskipun lapangan usaha tersebut menyumbang terbesar PDRB Kabupaten Pacitan, akan tetapi semakin tahun kontribusinya semakin menurun dan bahkan negatif di tahun 2024. Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2023 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 50,81%. Sektor Jasa dan sektor Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 33,26% dan 15,93%. - Tarif Trump: Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat memengaruhi harga barang dan daya saing produk lokal di pasar internasional. Sebagai respons, Kabupaten Pacitan harus fokus pada peningkatan efisiensi dan daya saing produk lokal, khususnya yang terkait dengan pertanian dan kerajinan tangan. Program Koperasi Merah Putih dapat memainkan peran penting dalam membantu produk lokal untuk lebih kompetitif di pasar global. 1. Ketahanan pangan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilisasi harga pangan serta mewujudkan	Selaras	Untuk ketahanan pangan pada sektor pertanian, Pemkab Pacitan dapat merinci program yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi pertanian yang tepat guna, diversifikasi tanaman pangan, serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta menetapkan target peningkatan produksi komoditas pangan strategis dan penurunan tingkat kerawanan pangan sebagai indikator kinerja. Pengelolaan belanja ketahanan pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator Ketahanan Pangan (Pertanian) tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD yang mendukung ketahanan pangan (perbaikan struktur upah, penurunan angka pengangguran, peningkatan

			kesejahteraan petani dan nelayan. Ketahanan pangan diharapkan dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing.		Nilai Tukar Petani, pengendalian inflasi, pelaksanaan program sosial yang tepat sasaran)
--	--	--	--	--	--

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; - Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet; - Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	none	Koperasi Merah Putih: Pemberdayaan Ekonomi Lokal Koperasi Merah Putih adalah sarana yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dengan membentuk koperasi yang berbasis pada prinsip-prinsip kerakyatan, Kabupaten Pacitan dapat memperkuat sektor ekonomi lokal, meningkatkan akses pasar bagi produk lokal, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam kebijakan keuangan daerah, alokasi anggaran untuk penguatan koperasi harus diprioritaskan. Ini bisa mencakup dana untuk pelatihan manajemen koperasi, bantuan modal kerja, serta pengembangan produk unggulan yang dapat dipasarkan secara lebih luas. Koperasi yang dikelola dengan baik tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global.	Selaras	Untuk dampak maksimal pada penurunan kemiskinan, Pemkab Pacitan dapat memastikan program pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki fokus pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa, pelatihan kewirausahaan, dan akses permodalan kemudian memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi lokal dengan memberikan pelatihan manajemen, fasilitasi akses pasar, dan kemudahan dalam permodalan serta menyertakan indikator kinerja yang secara langsung mengukur dampak program terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan jumlah UMKM yang naik kelas. Pengelolaan belanja ketahanan pangan/pertanian dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota baik dalam pendanaan yang bersumber dari TKD/APBD maupun dari skema pendanaan dari creative financing sesuai dengan kewenangan. agar menjadi perhatian belanja

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					fungsi perlindungan sosial terutama fokus pada pengentasan kemiskinan serta penguatan mandatory spending yang mendukung Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan. Mohon dipastikan pengawal kebijakan pada indikator Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM serta penurunan kemiskinan dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	- Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.	none	Sekolah Rakyat: Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang Sekolah Rakyat adalah salah satu kebijakan yang memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam konteks ini, kebijakan keuangan daerah harus memastikan bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan cukup besar dan dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Pacitan. Selain itu, dana juga perlu digunakan untuk pelatihan dan peningkatan kualitas guru agar mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Pendidikan yang merata akan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan prioritas RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati dengan mempertimbangkan ketercukupan belanja bidang kesehatan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah; Penguatan sektor pendidikan dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dalam rangka peningkatan akses ke pendidikan dasar dan menengah.	Selaras	Meskipun alokasi untuk pendidikan sangat besar, fokus pada "SPM Pendidikan Tinggi" secara spesifik belum terlihat jelas dalam program yang diuraikan. Pemkab Pacitan dapat mengidentifikasi secara spesifik bagaimana alokasi pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, baik melalui dukungan langsung kepada institusi pendidikan tinggi di Pacitan (jika ada), beasiswa bagi mahasiswa Pacitan, atau program peningkatan kualitas lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri local kemudian merinci bagaimana SPM Pendidikan Tinggi akan dicapai dan diukur, mengingat SPM umumnya lebih terkait dengan pendidikan dasar dan menengah. Jika yang dimaksud adalah dukungan terhadap akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Pacitan, maka program perlu dirinci lebih lanjut. Agar menjadi perhatian dalam pemenuhan belanja fungsi

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
					pendidikan, pengelolaan belanja pendidikan yang berkualitas. Pemda diharapkan mencantumkan target prevalensi stunting dalam dokumen KUAPPAS. Mohon dipastikan pengawalan kebijakan pada indikator pendidikan tersebut dalam rancangan PPAS/RKA SKPD/RAPBD.